



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2015  
TENTANG  
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Badan adalah Badan yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
12. Analisis Jabatan adalah uraian yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan/pekerjaan itu dilaksanakan, bagaimana wewenang, tanggung jawab, hubungannya dengan jabatan/pekerjaan lain dan risiko jabatan/pekerjaan.

13. Formasi jabatan adalah jumlah dan jenjang jabatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang ditugaskan untuk menguji kemampuan secara spesifik dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.

## BAB II JABATAN PELAKSANA

### Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan perbandingan obyektif antara persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang dimiliki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat pindah ke jabatan pelaksana lainnya seiring dengan bertambah atau meningkat dan menurunnya kompetensi dengan ketentuan :
  - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan formasi Perangkat Daerah; dan
  - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilakukan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi.
- (2) Bertambah atau meningkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kompetensi.
- (3) Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada form penilaian prestasi kerja PNS atau Keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin.

- (4) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat berpindah pada jabatan fungsional setelah diusulkan oleh Perangkat Daerah ke Badan melalui uji kompetensi.
- (5) Perpindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi harus ditetapkan dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Kompetensi yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui setelah dilakukan pengujian oleh tim penguji kompetensi.

### BAB III

#### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai formasi jabatan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
- (3) Apabila terdapat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara reguler.
- (4) Apabila terdapat PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi dengan formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sampai dengan Keputusan tentang Mutasi PNS tersebut ditetapkan, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tunjangan

- (2) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tidak diperbolehkan untuk :

- a. beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana;
- b. mengikuti tes penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat;
- c. mengikuti kenaikan pangkat reguler, kecuali dalam masa tugas belajar;
- d. diusulkan tes kenaikan pangkat Pembina; dan/atau
- e. mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi, harus diusulkan pemberhentian sementara guna memutus tunjangan jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi yang telah diangkat dalam jabatan fungsional, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
- (2) Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan perubahan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

Pasal 10

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila pejabat fungsional yang bersangkutan :
  - a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - e. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
  - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Apabila sejak diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional.
- (4) Pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap pejabat fungsional di lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
  - b. menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional;
  - c. mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya; dan
  - d. memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara profesional dan proporsional sesuai kualifikasi, kompetensi dan jenjangnya.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional harus tetap ditempatkan dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakibatkan peralihan jabatan PNS dari jabatan fungsional menjadi jabatan pelaksana.
- (3) Peralihan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.

### BAB IV

#### NAMA JABATAN

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Penetapan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis jabatan.
- (3) Penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dengan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
- (4) Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 15

Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar dalam :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan;
- b. pengembangan dan pola karir;
- c. promosi;
- d. mutasi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan;
- g. penghargaan;
- h. disiplin;
- i. pemberhentian; dan
- j. pensiun.

## BAB V

### SANKSI

## Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. PNS yang berasal dari formasi pengangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian, akan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan formasi jabatan yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah.

- b. PNS yang diangkat pada formasi tahun 2009 sampai dengan 2014 yang berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan jabatan yang tertera pada Keputusan CPNS atau formasi yang dilamar dan ditempatkan pada unit kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan jabatannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- c. Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang tidak ada dalam lampiran Peraturan Gubernur dikarenakan nama jabatan tersebut tidak terdapat dalam hasil analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maka akan disesuaikan dengan nama jabatan yang ada dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Desember 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 76 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 76 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

---

A. JABATAN PELAKSANA

| No | NAMA JABATAN                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB                        |
| 2  | Air Traffic Control                                          |
| 3  | Ajudan                                                       |
| 4  | Analisis Akuntabilitas Kinerja                               |
| 5  | Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan |
| 6  | Analisis Alih teknologi Perikanan                            |
| 7  | Analisis Angkutan Barang                                     |
| 8  | Analisis Aset Daerah                                         |
| 9  | Analisis Bahan Sengketa Hukum                                |
| 10 | Analisis Bantuan Hukum                                       |
| 11 | Analisis Bencana Mitigas Struktur                            |
| 12 | Analisis Bencana Mitigasi                                    |
| 13 | Analisis Berita                                              |
| 14 | Analisis Bidang Bangunan dan Landasan                        |
| 15 | Analisis Bidang Telekomunikasi dan Navigasi                  |
| 16 | Analisis Budidaya Perikanan                                  |
| 17 | Analisis Dampak Lalu Lintas                                  |
| 18 | Analisis Data Spasial Kehutanan                              |
| 19 | Analisis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum                 |
| 20 | Analisis Formasi Jabatan                                     |
| 21 | Analisis Gangguan Keamanan Hutan                             |
| 22 | Analisis Geologi                                             |
| 23 | Analisis Gerakan Tanah                                       |
| 24 | Analisis Harga Pasar                                         |
| 25 | Analisis Hidrologi                                           |
| 26 | Analisis Hukum                                               |
| 27 | Analisis Hutan dan Lahan                                     |
| 28 | Analisis Index Kepuasan Masyarakat                           |
| 29 | Analisis Instrumentasi dan Kontrol Kapal                     |
| 30 | Analisis Jabatan                                             |
| 31 | Analisis Jalan dan Jembatan                                  |
| 32 | Analisis Jarak Tempuh AKDP                                   |
| 33 | Analisis Kebudayaan dan Pariwisata                           |
| 34 | Analisis Kebutuhan Pasar Kerja SMK                           |
| 35 | Analisis Kebutuhan Pendidikan Pelatihan Ekspor               |
| 36 | Analisis Kelautan dan Perikanan                              |
| 37 | Analisis Kelembagaan                                         |
| 38 | Analisis Kelembagaan Agama                                   |
| 39 | Analisis Keolahragaan                                        |
| 40 | Analisis Kepemudaan                                          |
| 41 | Analisis Kepemudaan dan Keolahragaan                         |
| 42 | Analisis Kependidikan                                        |

| No | NAMA JABATAN                                         |
|----|------------------------------------------------------|
| 43 | Analisis Kependudukan                                |
| 44 | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil           |
| 45 | Analisis Kerjasama Antar Lembaga                     |
| 46 | Analisis Kerjasama Dalam Negeri                      |
| 47 | Analisis Kerjasama Luar Negeri                       |
| 48 | Analisis Kerukunan Beragama                          |
| 49 | Analisis Kesatuan Bangsa dan Politik                 |
| 50 | Analisis Kesehatan                                   |
| 51 | Analisis Kesehatan Ikan dan lingkungan               |
| 52 | Analisis Kesehatan Masyarakat                        |
| 53 | Analisis Kesejahteraan Sosial                        |
| 54 | Analisis Kesenian dan Budaya Daerah                  |
| 55 | Analisis Kesyahbandaran                              |
| 56 | Analisis Ketenagakerjaan                             |
| 57 | Analisis Keuangan                                    |
| 58 | Analisis Kimia                                       |
| 59 | Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah pesisir |
| 60 | Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum                |
| 61 | Analisis Koperasi dan UMKM                           |
| 62 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran                  |
| 63 | Analisis Kursus dan Kesetaraan                       |
| 64 | Analisis Laboratorium Benih Tanaman                  |
| 65 | Analisis Laboratorium Lingkungan Hidup               |
| 66 | Analisis Laboratorium Ternak                         |
| 67 | Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan                   |
| 68 | Analisis Lingkungan Hidup                            |
| 69 | Analisis Logistik dan Peralatan Bencana              |
| 70 | Analisis Manajemen Sekolah                           |
| 71 | Analisis Mutu Hasil Perikanan                        |
| 72 | Analisis Nilai Budaya                                |
| 73 | Analisis Obat dan Makanan                            |
| 74 | Analisis Organisme Pengganggu Tanaman                |
| 75 | Analisis Pakan Ternak                                |
| 76 | Analisis Panas Bumi                                  |
| 77 | Analisis Pariwisata                                  |
| 78 | Analisis Pasar Hasil Peternakan                      |
| 79 | Analisis Pelayanan Kesehatan                         |
| 80 | Analisis Pemasaran                                   |
| 81 | Analisis Pembangunan                                 |
| 82 | Analisis Pembangunan Kehutanan                       |
| 83 | Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak             |
| 84 | Analisis Pemerintahan                                |
| 85 | Analisis Pemetaan Sumber Daya Air                    |
| 86 | Analisis Penanaman Modal                             |
| 87 | Analisis Penanganan Konflik Sosial                   |
| 88 | Analisis Penatausahaan Hasil Hutan                   |
| 89 | Analisis Pencegahan Konflik Sosial                   |
| 90 | Analisis Pendapatan Daerah                           |

| No  | NAMA JABATAN                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 91  | Analisis Pendidikan                                              |
| 92  | Analisis Pengairan                                               |
| 93  | Analisis Pengelolaan dan Pengadaan Pembangunan                   |
| 94  | Analisis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan                        |
| 95  | Analisis Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat      |
| 96  | Analisis Pengembangan Investasi                                  |
| 97  | Analisis Pengembangan Kinerja                                    |
| 98  | Analisis Pengembangan Produk                                     |
| 99  | Analisis Pengembangan Profesi                                    |
| 100 | Analisis Pengembangan Sistem Informasi                           |
| 101 | Analisis Pengembangan Sumber Daya Kesehatan                      |
| 102 | Analisis Pengembangan UKM dan Koperasi                           |
| 103 | Analisis Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan             |
| 104 | Analisis Penggunaan Kawasan Hutan                                |
| 105 | Analisis Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset                   |
| 106 | Analisis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian                |
| 107 | Analisis Peningkatan Kapasitas SDM                               |
| 108 | Analisis Penyertaan Modal                                        |
| 109 | Analisis Peraturan Perundang-Undangan                            |
| 110 | Analisis Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman |
| 111 | Analisis Perencanaan Bangunan Gedung                             |
| 112 | Analisis Perencanaan Perumahan                                   |
| 113 | Analisis Perindustrian dan Perdagangan                           |
| 114 | Analisis Perizinan                                               |
| 115 | Analisis Perlindungan Perempuan dan Anak                         |
| 116 | Analisis Potensi Hutan                                           |
| 117 | Analisis Potensi Sumber Air Tanah                                |
| 118 | Analisis Potensi Wisata                                          |
| 119 | Analisis Produk Hukum                                            |
| 120 | Analisis Produksi Hasil Hutan                                    |
| 121 | Analisis Produksi Hortikultura                                   |
| 122 | Analisis Produksi Tanaman Pangan                                 |
| 123 | Analisis Program Lembaga Keuangan Mikro                          |
| 124 | Analisis Program Pelatihan Pemberdayaan                          |
| 125 | Analisis Program Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat            |
| 126 | Analisis Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                |
| 127 | Analisis Program Pembangunan                                     |
| 128 | Analisis Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam                  |
| 129 | Analisis Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat           |
| 130 | Analisis Program Penguatan Kelembagaan                           |
| 131 | Analisis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat              |
| 132 | Analisis Regulasi Semen Beku                                     |
| 133 | Analisis Rehabilitasi Bencana                                    |
| 134 | Analisis Rehabilitasi Hutan dan Lahan                            |
| 135 | Analisis Rekonstruksi Bencana                                    |
| 136 | Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi                          |
| 137 | Analisis Sarana dan Prasarana                                    |
| 138 | Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan                         |

| No  | NAMA JABATAN                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 139 | Analisis Sarana dan Prasarana Perkebunan                  |
| 140 | Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian                   |
| 141 | Analisis Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi   |
| 142 | Analisis Sarana Program Keluarga Berencana                |
| 143 | Analisis Sistem Informasi Kehutanan                       |
| 144 | Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian           |
| 145 | Analisis Sistem Informasi Pendapatan                      |
| 146 | Analisis Sistem Pembinaan Perpustakaan                    |
| 147 | Analisis Sosial Budaya                                    |
| 148 | Analisis Standar Kompetensi                               |
| 149 | Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan                 |
| 150 | Analisis Sumberdaya Kelautan dan Pesisir                  |
| 151 | Analisis Tanggap Darurat                                  |
| 152 | Analisis Tarif Transportasi                               |
| 153 | Analisis Tata Praja                                       |
| 154 | Analisis Tata Ruang                                       |
| 155 | Analisis Tatalaksana                                      |
| 156 | Analisis Teknis Bangunan Gedung                           |
| 157 | Analisis teknologi perikanan                              |
| 158 | Analisis Tenaga Kependidikan                              |
| 159 | Analisis Tenaga Kerja                                     |
| 160 | Analisis Tenaga Pendidik                                  |
| 161 | Analisis Topografi                                        |
| 162 | Analisis Toponimi                                         |
| 163 | Analisis Transportasi                                     |
| 164 | Analisis Upaya Kesehatan Masyarakat                       |
| 165 | Analisis Usaha dan Investasi Hasil Perikanan              |
| 166 | Analisis Usaha Perkebunan                                 |
| 167 | Bendahara Penerimaan                                      |
| 168 | Bendahara Penerimaan Pembantu                             |
| 169 | Bendahara Pengeluaran                                     |
| 170 | Bendahara Pengeluaran Pembantu                            |
| 171 | Caraka                                                    |
| 172 | Desain Kemasan Produk Industri                            |
| 173 | Desain Produk Industri                                    |
| 174 | Desain Produk Kulit                                       |
| 175 | Desain Promosi Kesehatan                                  |
| 176 | Desain Grafis                                             |
| 177 | Fasilitator Bantuan Hukum                                 |
| 178 | Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Perikanan             |
| 179 | Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Peternakan            |
| 180 | Fasilitator Hubungan Antar Lembaga                        |
| 181 | Fasilitator Pelaksanaan Penanaman Modal                   |
| 182 | Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata            |
| 183 | Fasilitator Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 184 | Fasilitator Pentas Seni Budaya                            |
| 185 | Fasilitator Perindustrian Dan Perdagangan                 |
| 186 | Fasilitator Promosi                                       |

| No  | NAMA JABATAN                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 187 | Fotografer                                                           |
| 188 | Inseminator Buatan                                                   |
| 189 | Juru Gambar                                                          |
| 190 | Juru Jalan                                                           |
| 191 | Juru Pengairan                                                       |
| 192 | Juru Sita                                                            |
| 193 | Kalibrator                                                           |
| 194 | Konselor                                                             |
| 195 | Konservator                                                          |
| 196 | Kurator Kesenian                                                     |
| 197 | Kurator Koleksi Museum                                               |
| 198 | Manajer Teknis Kalibrasi                                             |
| 199 | Manajer Teknis Pengujian                                             |
| 200 | Mekanik                                                              |
| 201 | Mekanik alat Berat                                                   |
| 202 | Mekanik Otomotif                                                     |
| 203 | Mekanik Pompa Air                                                    |
| 204 | Montir                                                               |
| 205 | Operator Alat Berat                                                  |
| 206 | Operator Audio Visual                                                |
| 207 | Operator Mesin Industri                                              |
| 208 | Operator Mesin Pengolah Kayu                                         |
| 209 | Operator Mesin Penyamakan Kulit                                      |
| 210 | Operator Pengolah Air limbah                                         |
| 211 | Operator Sandi                                                       |
| 212 | Operator Self Loader                                                 |
| 213 | Operator Sistem Jaringan Samsat                                      |
| 214 | Pekarya Kesehatan                                                    |
| 215 | Pekarya Pengairan                                                    |
| 216 | Pekarya Umum                                                         |
| 217 | Pekerja Jalan                                                        |
| 218 | Pelaksana Anjungan                                                   |
| 219 | Pelaksana Bantuan Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman |
| 220 | Pelaksana Bantuan Teknis Perumahan                                   |
| 221 | Pelaksana Bimbingan Teknis Kearsipan                                 |
| 222 | Pelaksana Bina Pasar dan Distribusi                                  |
| 223 | Pelaksana Gizi                                                       |
| 224 | Pelaksana Inventarisasi Infrastruktur Sumber Daya Air                |
| 225 | Pelaksana K5 Kawasan Pelabuhan                                       |
| 226 | Pelaksana Kualitas Air                                               |
| 227 | Pelaksana Pasar Lelang                                               |
| 228 | Pelaksana Pemagangan                                                 |
| 229 | Pelaksana Pemeliharaan dan Perbaikan                                 |
| 230 | Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian                                |
| 231 | Pelaksana Promosi Produk Dalam Negeri                                |
| 232 | Pelaksana Resi Gudang                                                |
| 233 | Pelaksana Survey dan Pengukuran                                      |
| 234 | Pelaksana Survey Pengairan                                           |

| No  | NAMA JABATAN                                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| 235 | Pelaksana Teknis Metrologi                        |
| 236 | Pelatih Teknis Perikanan                          |
| 237 | Pemandu Museum                                    |
| 238 | Pemandu Objek Wisata Alam                         |
| 239 | Pemandu Wisata                                    |
| 240 | Pemantau Harga Pasar dan Distribusi               |
| 241 | Pemantau Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan |
| 242 | Pemantau Tenaga Kerja                             |
| 243 | Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum              |
| 244 | Pembimbing Klien                                  |
| 245 | Pembimbing Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan   |
| 246 | Pembimbing Rehabilitasi Sosial                    |
| 247 | Pembudidaya Tanaman Obat                          |
| 248 | Pemelihara Tanaman Obat                           |
| 249 | Pemelihara Ternak                                 |
| 250 | Pemeriksa Asisten Teknik Reproduksi               |
| 251 | Pemeriksa Dokumen Penempatan TKI                  |
| 252 | Pemeriksa Kebuntingan Ternak                      |
| 253 | Pemeriksa Kendaraan Bermotor                      |
| 254 | Pemeriksa Kesehatan                               |
| 255 | Pemeriksa Keselamatan Darat                       |
| 256 | Pemroses Dokumen Ekspor                           |
| 257 | Pemroses Jabatan Struktural dan Fungsional        |
| 258 | Pemroses Mutasi Pegawai                           |
| 259 | Pemroses Non Perijinan                            |
| 260 | Pemroses Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan    |
| 261 | Pemroses Penerapan Teknologi Transfer Embrio      |
| 262 | Pemroses Pengadaan Barang/Jasa                    |
| 263 | Pemroses Pengadaan Pegawai                        |
| 264 | Pemroses Penilaian Angka Kredit                   |
| 265 | Pemroses Perijinan                                |
| 266 | Pemroses Rehabilitasi dan Pembinaan lanjut        |
| 267 | Pemroses Teknis Validasi Hasil Uji                |
| 268 | Pemulasaran Jenasah                               |
| 269 | Penaksir Bangunan Gedung                          |
| 270 | Penata Arsip                                      |
| 271 | Penata Bahan Kerjasama Jasa Kearsipan             |
| 272 | Penata Bahan Publikasi dan Promosi                |
| 273 | Penata Bina Wisata Alam dan kader Konservasi      |
| 274 | Penata Boga                                       |
| 275 | Penata Kegiatan pembinaan                         |
| 276 | Penata Laporan Keuangan                           |
| 277 | Penata Layanan Arsip                              |
| 278 | Penata Organisasi dan Tatalaksana Koperasi        |
| 279 | Penata Program Pembangunan Fisik Prasarana        |
| 280 | Penata Satuan Tugas Penanggulangan Bencana        |
| 281 | Penata Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial      |
| 282 | Penata Teknik jalan dan Jembatan                  |

| No  | NAMA JABATAN                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 283 | Penatalaksana Fasilitas Pengembangan                            |
| 284 | Penatalaksana Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan          |
| 285 | Penatalaksana Kawasan dan Pembibitan                            |
| 286 | Penatalaksana Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan                   |
| 287 | Penatalaksana Kerjasama Pariwisata                              |
| 288 | Penatalaksana Pakan Ternak                                      |
| 289 | Penatalaksana Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan   |
| 290 | Penatalaksana Pengembangan Atraksi Budaya                       |
| 291 | Penatalaksana Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya |
| 292 | Penatalaksana Produk Non Pangan Asal Hewan                      |
| 293 | Penatalaksana Produk Pangan Asal Hewan                          |
| 294 | Penelaah Peraturan Perundang - Undangan                         |
| 295 | Penerima Sampel Pengujian                                       |
| 296 | Pengadministrasi Barang                                         |
| 297 | Pengadministrasi Gudang                                         |
| 298 | Pengadministrasi Kebandarudaraan                                |
| 299 | Pengadministrasi Kepegawaian                                    |
| 300 | Pengadministrasi Keuangan                                       |
| 301 | Pengadministrasi Layanan Perpustakaan                           |
| 302 | Pengadministrasi Museum dan Keperbukalaan                       |
| 303 | Pengadministrasi Pajak                                          |
| 304 | Pengadministrasi Pelabuhan                                      |
| 305 | Pengadministrasi Pelayanan                                      |
| 306 | Pengadministrasi Perpustakaan                                   |
| 307 | Pengadministrasi Rekam Medik                                    |
| 308 | Pengadministrasi Retribusi                                      |
| 309 | Pengadministrasi Teknik Bina Marga                              |
| 310 | Pengadministrasi Teknik Pengairan                               |
| 311 | Pengadministrasi Teknik Perikanan                               |
| 312 | Pengadministrasi Teknik Perkebunan                              |
| 313 | Pengadministrasi Teknis                                         |
| 314 | Pengadministrasi Teknis Bahan Pustaka                           |
| 315 | Pengadministrasi Teknis Cipta Karya                             |
| 316 | Pengadministrasi Teknis Industri dan Perdagangan                |
| 317 | Pengadministrasi Teknis Lingkungan Hidup                        |
| 318 | Pengadministrasi Teknis Metrologi                               |
| 319 | Pengadministrasi Teknis Perhubungan dan LLAJ                    |
| 320 | Pengadministrasi Teknis Sosial                                  |
| 321 | Pengadministrasi Umum                                           |
| 322 | Pengamat Bibit Ternak                                           |
| 323 | Pengamat Hidrologi                                              |
| 324 | Pengamat Hidrometri                                             |
| 325 | Pengamat Jalan                                                  |
| 326 | Pengamat Tera                                                   |
| 327 | Pengamat Ternak                                                 |
| 328 | Pengamat Wilayah                                                |
| 329 | Pengambil Sampel Lingkungan                                     |
| 330 | Pengasuh Klien                                                  |

| No  | NAMA JABATAN                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 331 | Pengawas Alat Berat                                               |
| 332 | Pengawas Bangunan Pengairan                                       |
| 333 | Pengawas Barang Beredar Dan Jasa                                  |
| 334 | Pengawas Bengkel Lingkungan Industri Kecil                        |
| 335 | Pengawas Budidaya Perikanan                                       |
| 336 | Pengawas Energi dan Ketenagalistrikan                             |
| 337 | Pengawas Fasilitas Keamanan Penerbangan                           |
| 338 | Pengawas Hasil Hutan                                              |
| 339 | Pengawas Internal                                                 |
| 340 | Pengawas Jalan dan Jembatan                                       |
| 341 | Pengawas Jasa Konstruksi                                          |
| 342 | Pengawas Keamanan dan Keselamatan Penerbangan                     |
| 343 | Pengawas Kebersihan                                               |
| 344 | Pengawas Kebun                                                    |
| 345 | Pengawas Kegiatan Angkutan Udara                                  |
| 346 | Pengawas Keselamatan Jalan                                        |
| 347 | Pengawas Keselamatan Transportasi                                 |
| 348 | Pengawas Konservasi Laut                                          |
| 349 | Pengawas Lalu Lintas Angkutan Jalan                               |
| 350 | Pengawas Lalu Lintas Angkutan Laut                                |
| 351 | Pengawas Mutu Bibit Ternak                                        |
| 352 | Pengawas Mutu Hasil Peternakan                                    |
| 353 | Pengawas Operasional Jembatan Timbang                             |
| 354 | Pengawas Organisme Tumbuhan                                       |
| 355 | Pengawas Pariwisata                                               |
| 356 | Pengawas Pemanfaatan Air Tanah                                    |
| 357 | Pengawas Pembangunan Fisik                                        |
| 358 | Pengawas Pendidikan                                               |
| 359 | Pengawas Penegakan Peraturan Daerah                               |
| 360 | Pengawas Pengolahan Data Elektronik                               |
| 361 | Pengawas Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan                  |
| 362 | Pengawas Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran                     |
| 363 | Pengawas Pertambangan Umum dan Migas                              |
| 364 | Pengawas Sarana dan Prasarana                                     |
| 365 | Pengawas Sistem Transportasi                                      |
| 366 | Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan                                |
| 367 | Pengawas Teknis Kebandarudaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik |
| 368 | Pengawas Teknis Kimia                                             |
| 369 | Pengawas Teknis Lingkungan                                        |
| 370 | Pengawas Teknis Pengairan                                         |
| 371 | Pengawas Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan                       |
| 372 | Pengawas Transportasi                                             |
| 373 | Pengawas Wilayah Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan                |
| 374 | Pengelola Acara                                                   |
| 375 | Pengelola Akademik dan Pengajaran                                 |
| 376 | Pengelola Akuisisi Arsip                                          |
| 377 | Pengelola Alat Kelengkapan Dewan                                  |
| 378 | Pengelola Aset dan Bangunan                                       |

| No  | NAMA JABATAN                                               |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 379 | Pengelola Aset Pengairan                                   |
| 380 | Pengelola Asrama                                           |
| 381 | Pengelola Bahan Promosi Pariwisata                         |
| 382 | Pengelola Bangunan Gedung                                  |
| 383 | Pengelola Barang Inventaris                                |
| 384 | Pengelola Bengkel Rujukan                                  |
| 385 | Pengelola Diklat                                           |
| 386 | Pengelola Informasi Bencana                                |
| 387 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi                        |
| 388 | Pengelola Instalasi Pelabuhan Perikanan                    |
| 389 | Pengelola Instalasi Perikanan dan Kelautan                 |
| 390 | Pengelola Instalasi Rumah Sakit                            |
| 391 | Pengelola JKN dan Jamkesda                                 |
| 392 | Pengelola Kearsipan                                        |
| 393 | Pengelola Kebun                                            |
| 394 | Pengelola Kebutuhan Dasar Klien                            |
| 395 | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni                         |
| 396 | Pengelola Kemitraan dan Perijinan                          |
| 397 | Pengelola Kepegawaain                                      |
| 398 | Pengelola Konservasi Dan Lingkungan                        |
| 399 | Pengelola Laboratorium Workshop                            |
| 400 | Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat                      |
| 401 | Pengelola Layanan Pelabuhan                                |
| 402 | Pengelola Limbah                                           |
| 403 | Pengelola Limbah B3 dan Domestik                           |
| 404 | Pengelola Lomba Karya Cipta Siswa                          |
| 405 | Pengelola Momentum (P3K)                                   |
| 406 | Pengelola Obat dan Alat Kesehatan                          |
| 407 | Pengelola Pameran dan Peragaan                             |
| 408 | Pengelola Pelayanan Teknis                                 |
| 409 | Pengelola Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| 410 | Pengelola Pembinaan Potensi Masyarakat                     |
| 411 | Pengelola Penelitian, Pengembangan dan Diklat              |
| 412 | Pengelola Pengaduan Publik                                 |
| 413 | Pengelola Penginapan                                       |
| 414 | Pengelola Perpustakaan                                     |
| 415 | Pengelola Populasi Peternakan                              |
| 416 | Pengelola Potensi satuan Linmas                            |
| 417 | Pengelola Produksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak      |
| 418 | Pengelola Program                                          |
| 419 | Pengelola Promosi Karya Siswa                              |
| 420 | Pengelola Rapat dan Risalah                                |
| 421 | Pengelola Sarana dan Prasarana                             |
| 422 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pelabuhan                   |
| 423 | Pengelola Sarana dan Prasarana Perikanan                   |
| 424 | Pengelola Show Room                                        |
| 425 | Pengelola Sistem Pengendalian Dan Pelaporan                |
| 426 | Pengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                |

| No  | NAMA JABATAN                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 427 | Pengelola Tehnis Benih Tanaman Perkebunan                                    |
| 428 | Pengelola Teknik Produksi Tani                                               |
| 429 | Pengelola Teknis Pengembangan Kesenian Sekolah                               |
| 430 | Pengelola Teknologi Informasi                                                |
| 431 | Pengelola Teknologi Pasca Panen                                              |
| 432 | Pengelola teknologi perikanan                                                |
| 433 | Pengelola Utilitas                                                           |
| 434 | Pengembang Koleksi Museum                                                    |
| 435 | Pengembang Kurikulum                                                         |
| 436 | Pengemudi                                                                    |
| 437 | Pengemudi Ambulance                                                          |
| 438 | Pengendali Arsip                                                             |
| 439 | Pengendali Banjir dan Kekeringan                                             |
| 440 | Pengendali Informasi dan Dokumentasi                                         |
| 441 | Pengendali Mutu                                                              |
| 442 | Pengendali Mutu Produksi Benih                                               |
| 443 | Pengendali Operasional Lalu Lintas                                           |
| 444 | Pengendali Pemanfaatan Sumber Daya Air                                       |
| 445 | Pengendali Pengelolaan Hutan Produksi Lestari                                |
| 446 | Pengendali Proses                                                            |
| 447 | Pengendali Tata Ruang                                                        |
| 448 | Pengevaluasai Dan Monitoring Pengembangan Etika Politik                      |
| 449 | Pengevaluasi Advokasi dan Perlindungan sosial                                |
| 450 | Pengevaluasi dan Monitoring Demokrasi dan HAM                                |
| 451 | Pengevaluasi Dan Monitoring Lembaga Politik                                  |
| 452 | Pengevaluasi Dan Monitoring Ormas                                            |
| 453 | Pengevaluasi Dan Monitoring Pembauran                                        |
| 454 | Pengevaluasi Dan Monitoring Penanganan Konflik                               |
| 455 | Pengevaluasi dan Monitoring Pencegahan Konflik                               |
| 456 | Pengevaluasi dan Monitoring wawasan Kebangsaan                               |
| 457 | Pengevaluasi Dana Sosial dan Jaminan Sosial                                  |
| 458 | Pengevaluasi Kelembagaan                                                     |
| 459 | Pengevaluasi Kinerja Koperasi Berbadan Hukum                                 |
| 460 | Pengevaluasi Kinerja Pembangunan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman |
| 461 | Pengevaluasi Layanan Perbengkelan                                            |
| 462 | Pengevaluasi Pajak Daerah                                                    |
| 463 | Pengevaluasi Pemajuan HAM                                                    |
| 464 | Pengevaluasi Pengembangan Kinerja                                            |
| 465 | Pengevaluasi Perkembangan BUMD                                               |
| 466 | Pengevaluasi Produk Hukum                                                    |
| 467 | Pengevaluasi Program Konservasi dan Sumber Daya Alam                         |
| 468 | Pengevaluasi Studi Kelayakan dan Studi Amdal                                 |
| 469 | Pengkaji Produk Hukum                                                        |
| 470 | Pengolah Arsip                                                               |
| 471 | Pengolah Badan Pembentukan Peraturan Daerah                                  |
| 472 | Pengolah Bahan Kerjasama Kehutanan                                           |
| 473 | Pengolah Bahan Penetapan Standar Mutu                                        |
| 474 | Pengolah Bahan Pustaka                                                       |

| No  | NAMA JABATAN                                            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 475 | Pengolah Data                                           |
| 476 | Pengolah Gudang Logistik                                |
| 477 | Pengolah Hasil Perkebunan                               |
| 478 | Pengolah Hijauan Pakan Ternak                           |
| 479 | Pengolah Kerjasama dan Informasi                        |
| 480 | Pengolah Koleksi Deposit dan Layanan                    |
| 481 | Pengolah Laboratorium Perkebunan                        |
| 482 | Pengolah Lahan Hijauan Makanan Ternak                   |
| 483 | Pengolah Materi Pemasyarakatan Kearsipan                |
| 484 | Pengolah Media Penyuluhan                               |
| 485 | Pengolah Obat Tradisional                               |
| 486 | Pengolah Pakan Ternak                                   |
| 487 | Pengolah Pass dan TIM Bandara                           |
| 488 | Pengolah Pendidikan dan Pelatihan                       |
| 489 | Pengolah Perawatan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak |
| 490 | Pengolah Sarana Dan Penyuluhan kemetrollogian           |
| 491 | Pengolah Sarana dan Prasarana                           |
| 492 | Pengolah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas               |
| 493 | Pengolah Sarana dan Prasarana Lingkungan Industri Kecil |
| 494 | Pengolah Sarana Dan Prasarana Pengairan                 |
| 495 | Pengolah Standar Sarana                                 |
| 496 | Pengolah Tata Lingkungan Geologi                        |
| 497 | Penguji Analisa Proksimat Susu                          |
| 498 | Penguji Bahan Bangunan                                  |
| 499 | Penguji Bakteriologi                                    |
| 500 | Penguji Daging                                          |
| 501 | Penguji Keamanan Pangan                                 |
| 502 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja                 |
| 503 | Penguji Kualitas Semen Beku                             |
| 504 | Penguji Logam Berat                                     |
| 505 | Penguji Mikrobiologi                                    |
| 506 | Penguji Mutu Benih Tanaman Hutan                        |
| 507 | Penguji Mutu Bibit Tanaman Hutan                        |
| 508 | Penguji Organoleptic                                    |
| 509 | Penguji Parasitologi                                    |
| 510 | Penguji Pathologi                                       |
| 511 | Penguji Produk Pangan Asal Hewan                        |
| 512 | Penguji Serologi                                        |
| 513 | Penguji Sumber Benih Tanaman Hutan                      |
| 514 | Penguji Toxicologi                                      |
| 515 | Penjaga Tugu Batas                                      |
| 516 | Penyaji Bahan Informasi Pariwisata                      |
| 517 | Penyeleksi Calon Transmigran                            |
| 518 | Penyiap Bahan RUKD dan RUED                             |
| 519 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil                           |
| 520 | Penyuluh Bina Marga                                     |
| 521 | Penyuluh Bina Potensi Masyarakat                        |
| 522 | Penyuluh Dampak Lingkungan                              |

| No  | NAMA JABATAN                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 523 | Penyuluh Kemetrologian                                                     |
| 524 | Penyuluh Koperasi dan UMKM                                                 |
| 525 | Penyuluh Pamong Praja                                                      |
| 526 | Penyuluh Pemanfaatan Tanaman Obat                                          |
| 527 | Penyuluh Pengairan                                                         |
| 528 | Penyuluh Peraturan Perundang-undangan Daerah                               |
| 529 | Penyuluh Peternakan                                                        |
| 530 | Penyuluh Tenaga Kerja                                                      |
| 531 | Penyusun Abstraksi Hukum                                                   |
| 532 | Penyusun Bahan Akreditasi dan Perijinan Lembaga Latihan                    |
| 533 | Penyusun Bahan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas                       |
| 534 | Penyusun Bahan Bimbingan Teknis dan Kelembagaan                            |
| 535 | Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan                                        |
| 536 | Penyusun Bahan Evaluasi Penanaman Modal                                    |
| 537 | Penyusun Bahan Fasiltiasi Perfilman                                        |
| 538 | Penyusun Bahan Informasi dan Promosi                                       |
| 539 | Penyusun Bahan Informasi Kependudukan                                      |
| 540 | Penyusun Bahan Informasi Pasar Kerja                                       |
| 541 | Penyusun Bahan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak |
| 542 | Penyusun Bahan Kelembagaan Petani Perkebunan                               |
| 543 | Penyusun Bahan Kependudukan dan Catatan Sipil                              |
| 544 | Penyusun Bahan Kerjasama                                                   |
| 545 | Penyusun Bahan Kesejahteraan Pegawai                                       |
| 546 | Penyusun Bahan Modul Pembelajaran                                          |
| 547 | Penyusun Bahan Pelatihan                                                   |
| 548 | Penyusun Bahan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah                    |
| 549 | Penyusun Bahan Pembinaan dan Pemantauan Penempatan TKI                     |
| 550 | Penyusun Bahan Pembinaan dan Pengembangan Instruktur                       |
| 551 | Penyusun Bahan Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial                   |
| 552 | Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Bursa Tenaga Kerja                        |
| 553 | Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai                                           |
| 554 | Penyusun Bahan Pembinaan Perluasan Kerja                                   |
| 555 | Penyusun Bahan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja                        |
| 556 | Penyusun Bahan Pembinaan Teknis Perencanaan                                |
| 557 | Penyusun Bahan Penelitian dan Pengembangan                                 |
| 558 | Penyusun Bahan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif                         |
| 559 | Penyusun Bahan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif                            |
| 560 | Penyusun Bahan Pengembangan Sistem Manajemen mutu Diklat                   |
| 561 | Penyusun Bahan Pengembangan TIK                                            |
| 562 | Penyusun Bahan Peran Serta Perempuan                                       |
| 563 | Penyusun Bahan Promosi dan Pelatihan                                       |
| 564 | Penyusun Bahan Promosi Penanaman Modal                                     |
| 565 | Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi                                       |
| 566 | Penyusun Bahan Rancangan kebijakan Penanaman Modal                         |
| 567 | Penyusun Bahan Reparasi dan Bimbingan Edukasi                              |
| 568 | Penyusun Bahan Sistem Pembelajaran                                         |
| 569 | Penyusun Bahan Teknis Lingkungan Hidup                                     |
| 570 | Penyusun Bezzeting Dan Formasi Pegawai                                     |

| No  | NAMA JABATAN                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 571 | Penyusun Desain Produk Industri                                      |
| 572 | Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya                        |
| 573 | Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat                               |
| 574 | Penyusun Informasi dan Publikasi                                     |
| 575 | Penyusun Kegiatan Bantuan dan Perlindungan Sosial                    |
| 576 | Penyusun Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                  |
| 577 | Penyusun Kegiatan Pemberdayaan Sosial                                |
| 578 | Penyusun Kegiatan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial            |
| 579 | Penyusun Kerjasama Penanaman Modal                                   |
| 580 | Penyusun Konsep                                                      |
| 581 | Penyusun Kurikulum dan Pengajaran                                    |
| 582 | Penyusun Laporan Penanaman Modal                                     |
| 583 | Penyusun Media Informasi                                             |
| 584 | Penyusun Naskah Sosialisasi Hukum                                    |
| 585 | Penyusun Pedoman Teknis Kegiatan Kesenian                            |
| 586 | Penyusun Penelitian dan Pengembangan                                 |
| 587 | Penyusun Pengembangan dan Pemasaran                                  |
| 588 | Penyusun Pengendalian dan Operasi Lapangan                           |
| 589 | Penyusun Peta Daerah Rawan Bencana                                   |
| 590 | Penyusun Petunjuk Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman |
| 591 | Penyusun Petunjuk Teknis Perumahan                                   |
| 592 | Penyusun Program dan Anggaran                                        |
| 593 | Penyusun Program Pelatihan                                           |
| 594 | Penyusun Program Pelatihan Pegawai                                   |
| 595 | Penyusun Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana       |
| 596 | Penyusun Program Penataan Dan Pemberdayaan Penduduk                  |
| 597 | Penyusun Program Pengembangan Pegawai                                |
| 598 | Penyusun Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk                   |
| 599 | Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat                              |
| 600 | Penyusun Rencana Kegiatan Pendidikan Pelatihan Ekspor                |
| 601 | Penyusun Rencana Kegiatan Promosi Ekspor                             |
| 602 | Penyusun Rencana Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat               |
| 603 | Penyusun Rencana Makro Kehutanan                                     |
| 604 | Penyusun Rencana Pembinaan Angkutan Penumpang                        |
| 605 | Penyusun Rencana Tata Teknis Pengairan                               |
| 606 | Peramu Makanan Ternak                                                |
| 607 | Perawat Ternak                                                       |
| 608 | Perekayasa Pengembangan Teknologi Tepat Guna                         |
| 609 | Perencana dan Evaluasi Pembinaan Sekolah                             |
| 610 | Perencana Infrastruktur Sumber Daya Air                              |
| 611 | Perencana Produksi                                                   |
| 612 | Perencana Promosi dan Publikasi                                      |
| 613 | Perencana Teknis Industri dan Perdagangan                            |
| 614 | Perencana Teknis Jalan dan Jembatan                                  |
| 615 | Perumus Evaluasi pasca Diklat                                        |
| 616 | Petugas Asuransi dan Pemberdayaan TKI                                |
| 617 | Petugas Bengkel Pendidikan Kejuruan                                  |
| 618 | Petugas Bimbingan Kerohanian                                         |

| No  | NAMA JABATAN                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 619 | Petugas Diklat                                                      |
| 620 | Petugas Fasilitator Tata Ruang                                      |
| 621 | Petugas Fumigasi                                                    |
| 622 | Petugas Gudang                                                      |
| 623 | Petugas Gudang Logistik Bencana                                     |
| 624 | Petugas Higienis dan Sanitasi                                       |
| 625 | Petugas Humas                                                       |
| 626 | Petugas Inteljen Pol PP                                             |
| 627 | Petugas Jasa Kebandarudaraan                                        |
| 628 | Petugas Jurnal                                                      |
| 629 | Petugas Kasir                                                       |
| 630 | Petugas Keamanan                                                    |
| 631 | Petugas Kegiatan Acara                                              |
| 632 | Petugas Keprotokolan                                                |
| 633 | Petugas kesehatan                                                   |
| 634 | Petugas Kesyahbandaran                                              |
| 635 | Petugas Laboratorium Industri                                       |
| 636 | Petugas Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan                 |
| 637 | Petugas Laboratorium Pertanian                                      |
| 638 | Petugas Laboratorium Tenaga Kerja                                   |
| 639 | Petugas Laundry                                                     |
| 640 | Petugas Layanan Bimbingan dan Konseling TKI                         |
| 641 | Petugas Layanan Bimbingan dan Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan  |
| 642 | Petugas Layanan Bimbingan Teknis                                    |
| 643 | Petugas Layanan Informasi Bandara                                   |
| 644 | Petugas Layanan Operasional Pajak                                   |
| 645 | Petugas Layanan Transmigrasi                                        |
| 646 | Petugas Limbah                                                      |
| 647 | Petugas listrik dan mekanik Bendung                                 |
| 648 | Petugas Monitoring Lalu Lintas Angkutan Barang                      |
| 649 | Petugas Monitoring Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                   |
| 650 | Petugas Operasional Lalu Lintas                                     |
| 651 | Petugas Otomasi Perpustakaan                                        |
| 652 | Petugas Pelayanan Informasi                                         |
| 653 | Petugas Pelayanan Surat Keterangan Fiskal                           |
| 654 | Petugas Pembinaan dan Pengembangan Industri                         |
| 655 | Petugas Pemeliharaan                                                |
| 656 | Petugas Penagihan                                                   |
| 657 | Petugas Pendataan Dan Penetapan Obyek Pajak Dan Retribusi           |
| 658 | Petugas Penetapan Pajak                                             |
| 659 | Petugas Pengamanan dan Pengawasan                                   |
| 660 | Petugas Pengambil Contoh                                            |
| 661 | Petugas Pengawas Obat Hewan                                         |
| 662 | Petugas Pengelola Limbah                                            |
| 663 | Petugas Pengembangan Seni Budaya                                    |
| 664 | Petugas Penyuluh Industri Kulit                                     |
| 665 | Petugas Penyusutan dan Pemeliharaan Arsip                           |
| 666 | Petugas Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Bandar Udara |

| No  | NAMA JABATAN                                         |
|-----|------------------------------------------------------|
| 667 | Petugas Perpustakaan                                 |
| 668 | Petugas Pintu Air                                    |
| 669 | Petugas Posko Penanggulangan Bencana                 |
| 670 | Petugas Prasarana Lalu Lintas Jalan                  |
| 671 | Petugas Produksi Media Pendidikan                    |
| 672 | Petugas Protokol                                     |
| 673 | Petugas Sarana Bimbingan dan Pembinaan Lanjut        |
| 674 | Petugas Sarana dan Prasarana                         |
| 675 | Petugas Sarana dan Prasarana Kesenian                |
| 676 | Petugas Sarana dan Prasarana Pelayanan TIK           |
| 677 | Petugas Sarana Keterampilan                          |
| 678 | Petugas Sarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial     |
| 679 | Petugas Sarana Pendidikan                            |
| 680 | Petugas Sarana Pengembangan Potensi                  |
| 681 | Petugas Sarana Penyaluran dan Pembinaan Lanjut       |
| 682 | Petugas Siaran                                       |
| 683 | Petugas Standarisasi dan Sertifikasi                 |
| 684 | Petugas Sterilisasi                                  |
| 685 | Petugas Survey Dan Pengukuran                        |
| 686 | Petugas Survey Kehutanan                             |
| 687 | Petugas Survey LLASDP                                |
| 688 | Petugas Survey Perkeretaapian                        |
| 689 | Petugas Teknik Budidaya Perikanan                    |
| 690 | Pramu Asrama                                         |
| 691 | Pramu Bakti                                          |
| 692 | Pramu Gudang                                         |
| 693 | Pramu Pimpinan                                       |
| 694 | Pramu Sarana Wisata                                  |
| 695 | Pramusaji                                            |
| 696 | Pranata Laboratorium Farmasi                         |
| 697 | Pranata Laboratorium Fisioterapi                     |
| 698 | Pranata Laboratorium Fitokimia                       |
| 699 | Pranata Laboratorium Keperawatan                     |
| 700 | Pranata Laboratorium Klinik                          |
| 701 | Pranata Laboratorium Kultur Jaringan                 |
| 702 | Pranata Laboratorium Lingkungan                      |
| 703 | Pranata Laboratorium Metrologi                       |
| 704 | Pranata Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan    |
| 705 | Pranata Laboratorium Perkebunan                      |
| 706 | Pranata Laboratorium Peternakan                      |
| 707 | Pranata Laboratorium Teknik                          |
| 708 | Pranata Laboratorium Bahasa                          |
| 709 | Pranata Pengelolaan Leger Jalan                      |
| 710 | Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/ Perkebunan |
| 711 | Pranata Pengolahan Media Baru                        |
| 712 | Pranata Reproduksi Arsip                             |
| 713 | Pranata Restorasi Arsip                              |
| 714 | Preparator                                           |

| No  | NAMA JABATAN                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 715 | Psikolog                                                              |
| 716 | Reporter                                                              |
| 717 | Residu Peptisida dan Antibiotika                                      |
| 718 | Sterilisator Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan                   |
| 719 | Teknisi Apron Movement Control                                        |
| 720 | Teknisi Fasilitas Keamanan Penerbangan                                |
| 721 | Teknisi Keamanan Penerbangan                                          |
| 722 | Teknisi Laboratorium Kesehatan                                        |
| 723 | Teknisi Laboratorium Ternak                                           |
| 724 | Teknisi Listrik                                                       |
| 725 | Teknisi Listrik Bandara                                               |
| 726 | Teknisi Mekanik Bandara                                               |
| 727 | Teknisi Mesin                                                         |
| 728 | Teknisi Pelayanan Aeoronautika                                        |
| 729 | Teknisi Pengujian Lapangan                                            |
| 730 | Teknisi Pertanian                                                     |
| 731 | Teknisi Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) |
| 732 | Teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi                            |
| 733 | Tenaga Kesehatan Tradisional                                          |
| 734 | Tenaga Teknis Keperbukalaan                                           |
| 735 | Terapis Gigi dan Mulut                                                |
| 736 | Verifikator Administrasi Klaim                                        |
| 737 | Verifikator Dokumen Ekspor                                            |
| 738 | Verifikator Keuangan                                                  |

#### B. JABATAN FUNGSIONAL

| No | NAMA JABATAN                   |
|----|--------------------------------|
| 1  | Administrator Kesehatan        |
| 2  | Analisis Kepegawaian           |
| 3  | Analisis Pasar Hasil Pertanian |
| 4  | Analisis Pasar Hasil Perikanan |
| 5  | Analisis Ketahanan Pangan      |
| 6  | Apoteker                       |
| 7  | Arsiparis                      |
| 8  | Asisten Apoteker               |
| 9  | Asisten Pelatih Olahraga       |
| 10 | Assessor SDM Aparatur          |
| 11 | Auditor                        |
| 12 | Auditor kepegawaian            |
| 13 | Bidan                          |
| 14 | Dokter                         |
| 15 | Dokter Gigi                    |
| 16 | Dokter Pendidik Klinis         |
| 17 | Entomolog Kesehatan            |
| 18 | Epidemiolog Kesehatan          |
| 19 | Fisikawan Medis                |
| 20 | Fisioterapis                   |
| 21 | Guru                           |

| No | NAMA JABATAN                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 22 | Inspektur Ketenagalistrikan                                    |
| 23 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi                                  |
| 24 | Inspektur Tambang                                              |
| 25 | Instruktur                                                     |
| 26 | Mediator Hubungan Industrial                                   |
| 27 | Medik Veteriner                                                |
| 28 | Nutrisisionis                                                  |
| 29 | Okupasi Terapis                                                |
| 30 | Ortosis Prostetis                                              |
| 31 | Pamong Belajar                                                 |
| 32 | Pamong Budaya                                                  |
| 33 | Paramedik Veteriner                                            |
| 34 | Pekerja Sosial                                                 |
| 35 | Pelatih Olahraga                                               |
| 36 | Pembimbing Kesehatan Kerja                                     |
| 37 | Penata Ruang                                                   |
| 38 | Peneliti                                                       |
| 39 | Penera                                                         |
| 40 | Penerjemah                                                     |
| 41 | Pengantar Kerja                                                |
| 42 | Pengawas Benih Tanaman                                         |
| 43 | Pengawas Bibit Ternak                                          |
| 44 | Pengawas Ketenagakerjaan                                       |
| 45 | Pengawas Lingkungan Hidup                                      |
| 46 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian                                  |
| 47 | Pengawas Mutu Pakan                                            |
| 48 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) |
| 49 | Pengawas Perikanan                                             |
| 50 | Pengawas Sekolah                                               |
| 51 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa                                |
| 52 | Pengembang Teknologi Pembelajaran                              |
| 53 | Pengendali Dampak Lingkungan                                   |
| 54 | Pengendali Ekosistem Hutan                                     |
| 55 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan                       |
| 56 | Penggerak Swadaya Masyarakat                                   |
| 57 | Penguji Kendaraan Bermotor                                     |
| 58 | Penguji Mutu Barang                                            |
| 59 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja                        |
| 60 | Penyelidik Bumi                                                |
| 61 | Penyuluh Kehutanan                                             |
| 62 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat                                  |
| 63 | Penyuluh Perikanan                                             |
| 64 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan                         |
| 65 | Penyuluh Pertanian                                             |
| 66 | Penyuluh Sosial                                                |
| 67 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan                         |
| 68 | Perawat                                                        |
| 69 | Perawat Gigi                                                   |

| No | NAMA JABATAN                       |
|----|------------------------------------|
| 70 | Perekam Medis                      |
| 71 | Perekayasa                         |
| 72 | Perencana                          |
| 73 | Polisi Kehutanan                   |
| 74 | Polisi Pamong Praja                |
| 75 | Pranata Hubungan Masyarakat        |
| 76 | Pranata Komputer                   |
| 77 | Pranata Laboratorium Kesehatan     |
| 78 | Pranata Laboratorium Pendidikan    |
| 79 | Psikolog Klinis                    |
| 80 | Pustakawan                         |
| 81 | Radiografer                        |
| 82 | Refraksionis Optisien              |
| 83 | Sandiman                           |
| 84 | Sanitarian                         |
| 85 | Statistisi                         |
| 86 | Teknik Jalan dan Jembatan          |
| 87 | Teknik Pengairan                   |
| 88 | Teknik Penyehatan Lingkungan       |
| 89 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan |
| 90 | Teknisi Elektromedis               |
| 91 | Teknisi Gigi                       |
| 92 | Teknisi Litkayasa                  |
| 93 | Terapis Wicara                     |
| 94 | Widyaiswara                        |

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO